

HIGH POLITICS MUHAMMADIYAH: KONSISTENSI MENJAGA KHITTAH POLITIK KEBANGSAAN

Marratu Fahri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja
marratufahri71@gmail.com

Abstrak

Setelah reformasi banyak perubahan mendasar menyangkut hak dan kewajiban rakyat yang mengalami redefinisi. Sebelumnya sangat sedikit hak politik dinikmati rakyat, di tengah reformasi, rakyat seolah boleh menentukan sendiri hak-hak politis rakyat namun kesadaran akan kewajiban justru menyusut. Kondisi politik demikian terbuka itulah memungkinkan banyak pihak mendirikan partai politik, rakyat memiliki saluran politik yang luas melalui beragam wadah. Begitu juga dengan Ormas dan LSM beragam bentuknya tumbuh bak cendawan di musim hujan. Bahkan ada di antara mereka yang dalam batasan tertentu justru melampaui peran dan fungsinya, seolah menjadi lembaga politik formal bak partai politik atau sekurang-kurangnya menjadi "pengabsah/stempel", kekuatan politik tertentu. Beberapa kalangan banyak menginginkan agar Muhammadiyah tidak "abai" atau "malu-malu kucing", memanfaatkan peluang dan momentum seperti itu. Namun, Muhammadiyah tetap konsisten sebagai ormas keagamaan yang mengedepankan politik kebangsaan atau high politics sekalipun pernah bersentuhan dengan partai politik, sebagai anggota istimewa Masyumi dan membidani Parmusi dan bahkan era reformasi dianggap punya andil pendirian Partai Amanat Nasional. Namun, Muhammadiyah tidak pernah berubah menjadi partai politik dan tetap konsisten menjaga khittah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari partai politik atau organisasi apa pun. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya, dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari AD/ART, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam Persyarikatan.

Kata Kunci: high politics, politik kebangsaan

Abstract

After the reform, many fundamental changes regarding the rights and obligations of the people underwent redefinition. Previously, very few political rights were enjoyed by the people. In the midst of reform, it seemed as if the people were allowed to determine their own political rights, but the awareness of their obligations actually receded. Such an open political condition allows many parties to form political parties, the people have broad political channels through various platforms. Likewise, Mass Organizations and NGOs of various forms grow like mushrooms in the rainy season. Some of them even go beyond their roles and functions to a certain extent, as if they have become a formal political institution like a political party or at least become a "certifier/stamp", a certain political force. Some circles really want Muhammadiyah not to be "ignorant" or "shy", taking advantage of such an opportunity and momentum. However, Muhammadiyah has remained consistent as a religious mass organization that prioritizes national politics or high politics even though it has had contact with political parties, as a special member of Masjumi and gave birth to Parmusi and even in the reform era it is considered to have contributed to the founding of the National Mandate Party. However, Muhammadiyah has never turned into a political party and consistently maintains the core of Muhammadiyah as an Islamic da'wah movement that works in the field of human and social life, has no organizational relationship with and is not affiliated with any political party or organization. Every member of Muhammadiyah according to their human rights, may not enter or enter other organizations, as long as they do not deviate from the AD/ART, and other provisions that apply in the association.

Kata Kunci: high politics, national politics

A. PENDAHULUAN

Setelah gelombang reformasi yang dipelopori seorang tokoh Muhammadiyah, M. Amien Rais, telah berhasil membangkitkan semangat membangun Indonesia baru. Semangat reformasi membawa perubahan politik dan kultural yang kuat. Reformasi membawa angin keterbukaan yang tak terbatas. Di samping itu reformasi juga berdampak pada tumbuhnya kekuatan rakyat dalam bentuk *people power* dan *civil society* yang menginginkan kehidupan yang lebih demokratis, egalitarian dan toleran. (Abdul Mu'ti, 2002 : 38)

Secara harfiah, reformasi pada dasarnya berasal dari bahasa latin (*re*) kembali dan (*formare*) yang berarti membentuk. Dalam hal ini, reformasi didefinisikan sebagai “ usaha untuk membentuk kembali”. Istilah ini pertama kali digunakan oleh paus Gregorius VII yang mencita-citakan terjadinya *reformatio otius orbis* (reformasi atas seluruh tatanan dunia). Reformasi Gregorius ini di dalam pustaka Bahasa Inggris dikenal dengan Gregorian Reformation yang berhubungan dengan perubahan berbagai kaidah dan tatanan nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Budi Winarno, 2007 : 44)

Sebelum reformasi, kondisi politik digambarkan oleh Karl D. Jackson sebagai masyarakat politik birokrasi, menggambarkan bagaimana pada era Orde Baru arena politik sangat didominasi oleh birokrasi negara. Keputusan-keputusan penting diformulasikan dalam birokrasi, korps militer, dan administrasi sipil. Kelompok-kelompok di luar birokrasi, sebagaimana konsekuensi kuatnya organisasi birokrasi seperti pemimpin kharismatik, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan gerakan massa tidak mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan ditingkat nasional.

Akan tetapi sejak digelorkan para pendukung gerakan reformasi yang dimotori lokomotif reformasi, Amien Rais beserta komponen bangsa yang lain ternyata berbuah manis. Gerakan reformasi telah mengahiri kedigdayaan rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Berdasarkan pengamatan Eep Saefulloh Fatah, sebagaimana dikutip Marratu Fahri (2022:44), ada beberapa substansi perubahan

mendasar antara lain menyangkut hak dan kewajiban rakyat yang mengalami redefinisi. Segera setelah terjadi pergantian presiden, banyak kalangan menjadi seperti kuda liar yang baru dilepaskan dari istal. Kebebasan menjadi suasana umum di mana-mana. Ini merupakan salah-satu gejala dalam kerangka terjadi redefinisi (pendefinisian ulang) hak-hak politik rakyat. Jika di masa sebelumnya sangat sedikit hak politik yang bisa dinikmati rakyat, di tengah reformasi, rakyat seolah boleh menentukan sendiri hak-hak politis rakyat namun pada saat yang sama, kesadaran akan kewajiban justru menyusut. Banyak orang lupa jika hak untuk bebas itu dipahami secara benar, sebetulnya disepertarnya ada pagar bernama “kewajiban semua orang untuk menjaga keteraturan untuk tidak melanggar hak orang lain”. Reformasi yang benar seyogyanya ditandai oleh berkembang dan meluasnya hak-hak rakyat, namun disertai dengan tertunaikannya kewajiban-kewajiban rakyat.

Kondisi politik yang demikian terbuka itulah yang memungkinkan banyak pihak mendirikan partai politik, rakyat kemudian memiliki saluran politik yang luas melalui beragam wadah. Begitu juga dengan Ormas dan LSM dengan beragam bentuknya yang bertumbuh bak cendawan di musim hujan. Ormas dan LSM yang telah lama berdiri jauh sebelum era reformasi pun “merasa” punya hak untuk lebih berkiprah. Bahkan ada di antara mereka yang dalam batasan tertentu justru melampaui peran dan fungsinya, menjelma seolah menjadi lembaga politik formal bak partai politik atau sekurang-kurangnya menjadi “pengabsah/stempel”, terhadap partai politik atau kekuatan politik tertentu. Semakin terbukanya ruang aktivitas politik bagi masyarakat untuk menduduki jabatan-jabatan politik memang memungkinkan adanya organisasi di luar partai politik sering bertindak “salah kamar”, “ambil kaplingan orang” dalam menjalankan peran dan fungsinya ke arah politik praktis. Tapi, anehnya di era keterbukaan politik seperti saat ini justru secara pragmatis efektif dalam meraih kepentingan politik praktis jangka pendek, berupa jabatan-jabatan, baik menteri, komisaris BUMN, staf ahli, kucuran dana hibah, dan lain-lain yang betapa pun itu terkadang sekadar jadi alat pelegitimasi kepentingan politik tertentu di luar dirinya.

Bagaimana dengan Muhammadiyah? Beberapa kalangan internal dan juga eksternal Muhammadiyah banyak yang menginginkan agar Muhammadiyah tidak begitu “abai” dan “malu-malu kucing”, memanfaatkan peluang dan momentum seperti itu. Hal inilah kata mereka yang menyebabkan Muhammadiyah tidak banyak menempatkan kader-kadernya pada jabatan politik, utamanya jabatan publik/politik, pimpinan BUMN, misalnya. Padahal Muhammadiyah dikenal sebagai ormas dengan massa kaum intelektual terbesar di Indonesia, tentu akan banyak tokoh-tokohnya yang dianggap kredibel dan memiliki integritas memegang jabatan-jabatan politik/publik.

Ada pun jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan menurut Sutrisno Hadi (1990), karena data-data atau bahan-bahan penelitiannya diperoleh dari perpustakaan berupa buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, majalah, dan lain-lain. Dengan demikian maka pengumpulan data pada penelitian ini tertumpu pada berbagai dokumen yang relevan dengan tema atau judul penelitian untuk selanjutnya dilakukan content analysis atau analisis isi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Suwarno (2002:18), mengkaji sejarah Muhammadiyah pada hakikatnya adalah mengkaji sejarah umat Islam Indonesia secara mikro dan sejarah bangsa Indonesia secara makro. Hal ini lantaran Muhammadiyah adalah bagian dari mata rantai umat Islam dan bangsa Indonesia. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 M bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1330 H, merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki peranan signifikan di Indonesia sejak paruh pertama abad ke 20 hingga sekarang. Bahkan, Syafii Maarif menegaskan bahwa dilihat dari perspektif sejarah, proses pendirian Muhammadiyah merupakan suatu terobosan yang memiliki dampak positif bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar

agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. (Sazali, 2005:6)

Mitsuo Nakamura, antropolog asal Jepang dalam disertasinya berjudul “The Crscent Arises Over The Banyam tree; A Study Of The Muhammadiyah Movement In a Central Javanese Town”, menyebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan yang memiliki Multy Face (banyak wajah) karena dalam perkembangannya Muhammadiyah bisa dilihat sebagai Organisasi Sosial, Keagamaan, Budaya, Intelektual, hingga Organisasi Amal Usaha. Dalam konteks Gerakan pemikiran dan Keagamaan misalnya, Muhammadiyah telah mampu memerankan dirinya sebagai gerakan Tajdid yang telah mencatat perjalanan awal bangsa ini. Begitu juga sebagai gerakan amal, Muhammadiyah hingga perkembangan terakhir telah berhasil memiliki amal usahanya dengan jumlah yang banyak. Keberadaan Muhammadiyah ini tentu sangat langkah jika ditilik dan dibandingkan dengan berbagai organisasi yang ada di tanah air kita.

Muhammadiyah menurut Kuntowijoyo, merupakan gerakan yang menghadirkan ideologi baru dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ideologi baru tersebut dihubungkan dengan perubahan sosial dari masyarakat desa ke masyarakat Kota, dari agraris Ke Industri, dan dari masyarakat Tradisional ke masyarakat maju yakni terbentuknya masyarakat kota , Industrial, Modern. Sedangkan Alfian menunjuk Muhammadiyah dengan tokohnya Ahmad Dahlan sejak kelahirannya tampil sebagai “Religious reformist” atau kekuatan Reformasi Keagamaan, Agen Of Sosial Change” Atau kekuatan Perubahan Sosial, dan “Political Force” atau kekuatan Politik dalam kehidupan Bangsa Indonesia, Soekarno, proklamator dan Presiden RI pertama bahkan menyebut Muhammdaiyah berperan sebagai kekuatan modernisasi sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Muhammadiyah dengan kekuatan keagamaan yang berorientasi pada kemajuan itu maka secara objektif berperan penting dan strategis dalam sejarah perjalanan bangsa ini (Haedar Nashir,2012:12).

Fenomena proses lahirnya gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern di Indonesia pada awal abad 20, tidak lepas dari kondisi eksternal dan internal yang mengiringinya. (PWM Sumsel, 2010:1) Secara eksternal, munculnya gerakan pembaruan di Indonesia seperti direpresentasikan dengan berdirinya persyarikatan Muhammadiyah pada masa itu adalah: Pertama, masuknya pengaruh atau ide-ide pembaruan dari Timur Tengah, terutama dari Mesir, yang bersumber dari pemikiran para tokoh terkemuka Islam, antara lain: Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Ide-ide pembaruan itu kemudian masuk ke Indonesia melalui para pelajar Indonesia di Mekkah dan juga oleh para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air. Selain itu ide-ide pembaruan itu juga masuk melalui media massa, seperti majalah Al. Manar. Kedua, adanya politik Kristenisasi oleh pemerintah Kolonial Belanda, yang puncaknya pada tahun 1909-1916.

Selain itu, kelahiran gerakan Muhammadiyah juga tidak terlepas dari faktor-faktor internal. Pertama, berdirinya Muhammadiyah merupakan semacam reaksi atau resistensi terhadap praktek-praktek islam yang telah bercampur dengan pola-pola kepercayaan Hindu-Budha dan aliran-aliran kepercayaan setempat, seperti Animisme dan Dinamisme. Kedua, adalah faktor keterbelakangan sistem pendidikan Islam di Indonesia sebelum abad ke 20. Keterbelakangan yang dimaksud selain disebabkan oleh sistem pendidikan yang masih sangat tradisional juga dipengaruhi sifat konservatisme umat islam yang cenderung kepada nilai-nilai lama, tidak saja sudah ketinggalan zaman tetapi juga menutup peluang bagi munculnya pemikiran-pemikiran baru yang dinamis.

Muhammadiyah dan Persentuhan Politik

Jika melihat dari sejarah kelahirannya, maka jelas sekali Muhammadiyah pada awalnya memang tidak didesain untuk berpolitik praktis. Akan tetapi, dalam perjalanannya Muhammadiyah ternyata sempat "bersentuhan" dengan politik praktis (baca: partai politik) yang bersama Nahdlatul Ulama (NU) pernah menjadi anggota istimewa Masyumi. Sebelum akhirnya NU keluar dari Masyumi melalui muktamarnya di

Palembang tahun 1952 untuk kemudian mendirikan partai sendiri yakni partai Nahdlatul Ulama (NU). Hajriyanto Y. Thohari (2005:vi), menyebutkan pada masa keemasan Masyumi (1946-1960) dukungan massa Muhammadiyah sangatlah besar yang keterlibatannya dalam berpolitik melalui Masyumi bukan hanya secara eksponensial (dengan melibatkan eksponen-eksponennya yang utama), melainkan juga secara organisasional dan institusional: yakni menjadi anggota istimewa Masyumi.

Ketika Masyumi dibubarkan atau tepatnya membubarkan diri tahun 1960 dan upaya merehabilitasi Masyumi tidak mendapat persetujuan pemerintah, telah mendorong elite-elite Muhammadiyah mendirikan partai Islam baru yang terpisah dari Masyumi. Dibentuklah tim Tujuh yang diketuai KH.Fakih Usman (Muhammadiyah) untuk melakukan pengkajian mendalam mengenai partai. Dari hasil tim disepakati dibentuk Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) sebagai ahli waris "Bulan Bintang" Muhammadiyah adalah salah satu dari penandatanganan piagam pembentukan Parmusi, selain Alwashliyah, Perti, KAHMI, dan lain-lain. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.70/1968 tertanggal 20 Februari 1968 yang secara sah mengesahkan berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) di bahwa pimpinan Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal. Menariknya, saat ditetapkan sebagai pimpinan Parmusi Djarnawi Hadikusuma masih tercatat sebagai Ketua Lembaga Hikmah/anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketika Parmusi mengadakan muktamar 4-7 Nopember 1968 di Malang maka terpilihlah secara aklamasi Mohammad Roem sebagai Ketua. Akan tetapi, rezim Orde Baru, melalui Alamsyah Ratuperwiranegara tidak memberikan "restu" atau tidak menyetujui terpilihnya Roem yang notabene merupakan tokoh Masyumi.

Persentuhan Muhammadiyah dengan politik praktis pada era reformasi terjadi lagi terkait pendirian Partai Amanat Nasional (PAN) tanggal 23 Agustus 1998. Walaupun secara organisatoris antara PAN dan Muhammadiyah tidak ada hubungan. Namun, ada pihak yang mengaitkannya. Hubungannya lebih merupakan keterikatan moral-politis dan historis. Hal ini terkait

dengan keputusan sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1998 di Semarang yang mengamatkan kepada PP Muhammadiyah untuk (1) melakukan ijtihad politik guna kemaslahatan umat dan bangsa secara maksimal yang dilandasi semangat amar makruf nahi munkar. (2) menyusun agenda reformasi (konsep dan strategi reformasi Muhammadiyah) diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara menuju makin cepat terwujudnya masyarakat utama yang sejahtera. Amanah tentang ijtihad politik inilah yang dimaknai oleh berbagai pihak terutama elit PAN sebagai bentuk keterkaitan Muhammadiyah dengan PAN. Amien Rais dianggap "representasi" politiknya. Inilah yang disebut AM.Fatwa PAN merupakan hasil "ijtihad politik Tanwir Muhammadiyah".Memang sulit dibantah bahwa awal berdirinya partai ini dan juga persebarannya ke segenap penjuru tanah air sedikit banyak karena keterlibatan orang-orang dan sarana Muhammadiyah. Namun demikian, Sidang pleno diperluas PP Muhammadiyah tanggal 22 Agustus 1998 dan 27 September 1998 memutuskan bahwa antara PAN dan Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris dan juga ketika mendirikan PAN, Amien Rais selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah diharuskan mundur dari jabatannya, karena memang tidak boleh rangkap jabatan dengan partai politik.

Sehubungan dengan hal itu, dalam sejarahnya kata Haedar Nashir (2019:110), betul sekali bahwa Muhammadiyah meskipun tidak berpolitik praktis karena posisinya sebagai organisasi dakwah dan kemasyarakatan, secara faktual tidak lepas dari kehidupan politik terutama melalui para tokoh dan kadernya. Dalam kurun yang cukup panjang sekitar 15 tahun (1945-1960) Muhammadiyah bahkan menjadi anggota istimewa Masyumi sampai partai Islam ini dibubarkan pada 1960. Muhammadiyah juga memiliki keterlibatan ikut mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) di era awal Orde Baru, meskipun dikemudian hari tidak berhasil menjadi partai yang diharapkan menggantikan Masyumi. Steleah reformasi 1998 atas mandat Tanwir Semarang dilakukan "ijtihad"politik" berdiri Partai Amanat Nasional (PAN), yang sama seperti Parmusi berdiri terpisah dari Organisasi Muhammadiyah dalam politik . Namun, kata

Haedar Nashir lebih lanjut, setelah tiga kali "keterlibatan" dalam politik tersebut, Muhammadiyah tetap berposisi dan berperan diri sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berafiliasi pada partai politik tertentu serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis (politik kekuasaan, power struggle) sebagaimana yang menjadi tugas partai politik dalam sistem politik modern.

Keterlibatan atau titik singgung Muhammadiyah dengan politik dimaksud tentu tidak salah sepanjang tidak salah arah untuk membedakannya dengan posisi dia sebagai kelompok kepentingan (interest group) di satu sisi dengan partai politik di sisi lain. Terlepas dari masalah posisi, menurut Arbi Sanit (1985:58), di sepanjang hidupnya organisasi kemasyarakatan (termasuk Muhammadiyah tentunya, pen) memberikan kontribusinya kepada politik sebagai salah satu bidang atau bentuk kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat itulah berkembang dinamika politik yang juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika organisasi kemasyarakatan non partai politik seperti Muhammadiyah.

Oleh karena itu hal yang menarik atau bahkan hebatnya di sini adalah betapa pun Muhammadiyah sempat bersentuhan atau bersinggungan dengan politik praktis seperti dipaparkan di atas ternyata Muhammadiyah tidak pernah merubah wujudnya menjadi partai politik. Dalam konteks ini Amir Santoso, salah seorang pakar politik pernah menyatakan bahwa Muhammadiyah "tidak memiliki dosa politik" pada masa lalu, karena dia tidak pernah menjadi partai politik. Dengan kata lain, betapapun keterlibatan Muhammadiyah dan juga elite-elitnya dalam persentuhan dengan partai politik tidaklah menyebabkan Muhammadiyah demikian larut dan merubah dirinya menjadi partai politik. Hal ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU), yang sempat menjadi sebuah partai politik, disamping juga sebagai ormas keagamaan. Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah keterlibatannya dalam poros NASAKOM (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) yang digagas dan dijalankan oleh Soekarno pada era demokrasi Terpimpin. Saat itu yang menerima dan menjadi pendukung utama NASAKOM terdiri dari PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai representasi kaum nasionalis, NU (Nahdlatul Ulama) representasi kaum agamis dan PKI

(Partai Komunis Indonesia) sebagai representasi golongan komunis.

Menurut Miftah Thoha (2012:19), kekuasaan Nasakom saat itu memasuki relung-relung tatanan birokrasi pemerintahan pusat dan daerah. Birokrasi pemerintahan seperti sudah dikapling oleh tiga kekuasaan politik dan didukung oleh kebijakan presiden. Saat itu kata Miftah Thoha, kelompok partai nasionalis menguasai Departemen Dalam Negeri, mulai dari menteri sampai ke camat dan desa dijabat oleh orang Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dan Departemen Agama, mulai dari menteri sampai Kepala Kantor Urusan Agama dijabat oleh orang-orang partai agama yang diwakili Partai Nahdlatul Ulama (NU), dan PKI menguasai departemen-departemen perhubungan sampai ke tubuh militer.

Kembali ke konsep atau istilah high politics Muhammadiyah awalnya diperkenalkan dan dipopulerkan oleh M. Amien Rais, salah seorang dari tiga orang yang oleh beberapa pengamat disebut sebagai “pendekar Chicago”, pendekar lainnya yakni Nurcholis Madjid dan Ahmad Syafii Maarif. Menurut Amien, high politics Muhammadiyah adalah politik yang mengedepankan moral etis, politik adiluhung, politik yang tidak saling menafikan, atau politik kebangsaan yang tetap dalam koridor atau perspektif amar makruf dan nahi munkar. Seruan menyatakan sikap tegas terhadap korupsi, mengajak masyarakat untuk memerangi ketidakadilan, mengimbau pemerintah untuk terus menyuarkan proses demokrasi dan keterbukaan adalah wujud praksis high politics.

Menurut Amien Rais ada tiga ciri politik kualitas tinggi. Pertama, setiap kedudukan politik hakikatnya merupakan amanah yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Kekuasaan adalah nikmat untuk mengayomi, menegakkan keadilan, tertib sosial, egalitarian Kedua, setiap kedudukan politik mengandung pertanggungjawaban. Ketiga, aktivitas politik harus berkaitan dengan prinsip ukhuwah, yakni persaudaraan, membangun pengertian dan kerjasama, menunaikan aktivitas kekhilafahan. Dengan demikian, maka high politics dimaksud tentu berbeda dan sebagai lawan dari low politics, yang justru sebaliknya, yang menurutnya cenderung nista. High politics yang

dikemukakan Amien Rais tersebut menurut Hajriyanto Y. Thohari (2005:198) bukanlah sesuatu yang baru dan asing karena konsep ini merupakan kinerja lama Muhammadiyah dengan formulasi baru.

Jika dirunut ke belakang, konsep high politics ini dapat dilihat dari khittah Ponorogo dan khittah Ujung Pandang, sebagaimana tertuang pada buku 1 Abad Muhammadiyah (2010:225-228). Salah satu butir penting yang diputuskan pada Sidang Tanwir di Ponorogo tahun 1969 adalah lahirnya khittah Ponorogo yang antara lain menyatakan pandangan politik Muhammadiyah. Pada dasarnya, khittah Ponorogo menjelaskan dan menegaskan sikap Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam yang bekerja dalam lapangan kemasyarakatan dan tidak dalam lapangan politik praktis (politik kenegaraan). Menariknya, dalam khittah Ponorogo juga terbuka peluang bagi Muhammadiyah untuk mendirikan partai politik yang berada di luar Muhammadiyah sebagai proyek yang dibina Muhammadiyah, memiliki hubungan ideologis dengan Muhammadiyah, tapi tidak memiliki hubungan organisatoris,

Sementara itu, khittah Ujung Pandang (sekarang Makassar) lahir sebagai salah satu hasil Keputusan muktamar Muhammadiyah ke-38, 21-26 September 1971 memutuskan bahwa “Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari partai politik atau organisasi apa pun. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya, dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari AD/ART, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam Persyarikatan.”

Khittah Ujung Pandang membuat garis yang tegas antara Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dan partai politik. Semua partai politik tidak ada yang dilebih-lebihkan, tetapi menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Menurut Haedar Nashir lahirnya khittah Ujung Pandang memosisikan klausul tentang terbukanya mendirikan partai politik di luar organisasi Muhammadiyah yang tersebut dalam khittah Ponorogo sudah di “nasakh”, dihapus atau tidak berlaku lagi. Khittah Ujung Pandang inilah yang paling banyak dirujuk dan menjadi pedoman atau acuan pokok

dalam menentukan sikap organisasi menghadapi dunia politik.

Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Tanwir Muhammadiyah di Denpasar Bali tahun 2002 menyatakan bahwa : “..... Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar makruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban....”

Prinsip khittah yang demikian itulah yang dipedomani secara sungguh-sungguh oleh Muhammadiyah. Khittah dimaksud tentu tidak berorientasi kekuasaan atau low politics, tapi politik kebangsaan atau high politics sesuai dengan khittah pendiriannya sebagai organisasi dakwah amar makruf nahi munkar yang melakukan pembinaan dan pencerahan masyarakat dan peran-peran kebangsaan secara umum. Dalam konteks inilah mengapa para elit Muhammadiyah tidak mudah terjebak dan cenderung terjaga atau konsisten untuk tidak melakukan manuver-manuver politik yang mengarah ke politik praktis demi kepentingan pragmatis jangka pendek. Sikap konsisten itu juga disebabkan karena kemapanan organisasi Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi amal terbesar di dunia.

Sikap konsisten menjaga khittah organisasi inilah yang mendorong para pimpinan Muhammadiyah cenderung berhati-hati, membuat statement yang bermuatan politik praktis. Hal itu dilakukan untuk menjaga marwah Persyarikatan agar tidak over acting atau “salah kamar”, yang sejatinya adalah ormas keagamaan, bukan organisasi politik. Terlebih mengingat Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang lebih mengedepankan aturan formal organisatoris daripada “petuah” personal para elitnya. Oleh karena itu, tak aneh jika bagi sementara pengamat, menurut Hajriyanto Y. Thohari (2005:165), ada yang berpendapat bahwa Muhammadiyah secara politik terkesan kaku, tidak piawai, dan miskin manuver. Muhammadiyah memandang politik

tidak sebagai the art of possible, lagi: terlalu straight forward dan lugas.

Satu hal menarik perlu dinukil terkait high politics Muhammadiyah ini adalah pernyataan M. Amien Rais (2004:49) yang menurutnya salah satu rahasia kelestarian dan kestabilan Muhammadiyah terletak pada kepiawaiannya untuk menghindari politik praktis. Pengalaman menunjukkan, kata Amien, bila kepentingan politik sudah masuk ke dalam tubuh sebuah organisasi non politik, maka organisasi tersebut menjadi rawan konflik perpecahan.

Terlepas dari semuanya itu, adanya komitmen para pimpinan dan warga Persyarikatan dalam ber-Muhammadiyah sangat menentukan dalam menjaga agar organisasi berlambang matahari ini abadi sepanjang zaman, jauh dari perpecahan dan konflik internal dan sekaligus tidak terjebak pada politik praktis atau low politics. Menurut Rosyad Sholeh (2010:151, anggota Persyarikatan dapat dikatakan punya komitmen apabila dapat memperlihatkan tiga sikap, yakni: pertama, menerima, memahami dan menyetujui secara tulus segenap nilai dan norma gerakan seperti ideologi, khittah perjuangan Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta aturan-aturan Persyarikatan lainnya.; kedua, dengan senang hati melibatkan diri berpartisipasi dan berkiprah dalam kegiatan Persyarikatan sesuai tanggungjawabnya. Ketiga, memiliki loyalitas dan rasa memiliki terhadap Persyarikatan.

C. REFERENSI

- Hadi, Sutrisno.1990. Metodologi Research. Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM.
- Jurdi, Syarifuddin,dkk (ed).2010. 1 Abad Muhammadiyah, Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Ma`arif, Ahmad Syafii 2005. “Kepemimpinan Muhammadiyah yang Arif dan Peka “, dalam Abdul Munir mulkhan dkk . Kepemimpinan Propetik untuk gerakan Tajdid (jelang Seabad Muhammadiyah). Jogjakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mu`ti Abdul 2002. “Muhammadiyah dan Birokrasi : Dari Gerakan Dakwah Struktural-Birokratis Menuju Kultural-Populis “, Dalam Jurnal Profetik Vol. VI, No.1.

- Marratu Fahri, 2022. Perjalanan dan Perkembangan Sistem Politik Indonesia dari Masa ke Masa. Depok : RajaGrafindo Persada.
- Nashir, Haedar. 2012. "Muhammadiyah Memajukan Bangsa", dalam Majalah Suara Muhammadiyah No. 22/ TH Ke-97 Edisi 16- 30 Nopember.
- _____2019. "Beragama yang Mencerahkan dan Memajukan Muhammadiyah ke Depan", dalam Berita Resmi Muhammadiyah. No.05/2015-2020/Sya'ban 1440.H/April 2019.M
- Rais, M.Amien.2004. Visi dan Misi Muhammadiyah. Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah.
- Suwarno.2002. Muhammadiyah sebagai Oposisi, Studi tentang Perubahan Perilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998. Yogyakarta : UII Press.
- Sholeh, Rosyad, (2010) Manajemen Dakwah Muhammadiyah. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Sazali. 2005. Muhammadiyah dan Masyarakat Madani (Independensi, Rasionalitas Dan Pluralisme). Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.
- Sanit, Arbi.1985.Swadaya Politik Masyarakat,Telaah tentang keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi.Jakarta: Rajawali.
- Thohari, Hajriyanto Y. 2005. Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis. Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.
- Thoha, Miftah.2012. Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. 2010. Sejarah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Palembang:Tunas Gemilang Press.
- Winarno, Budi.2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta : Med Press.